

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak 1 Januari 2001. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemerintah daerah otonom dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Adanya kelemahan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 maka dilakukan revisi serta perbaikan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah akan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 1) menyatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik

Indonesia, 2014: 3). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan serta melakukan peran alokasinya secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Penetapan prioritas pembangunan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah melalui wewenang kebijakan otonomi daerah ini tidak hanya berhenti pada pembagian dana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah akan mengalami keberhasilan jika diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Artinya, bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya berasal dari besaran pengeluaran konsumsi pemerintah saja tetapi dengan adanya peran ekonomi masyarakat yang harus didorong dalam mempercepat peningkatan pembangunan. Kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi dan peran masyarakat ini merupakan sebuah pengelolaan perekonomian bersifat *bottom up* (Saragih, 2003:28).

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Selain itu, pembangunan juga tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2006: 17). Salah satu pembangunan daerah yang dilakukan adalah di bidang pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan salah satu proses

pembangunan yang mencakup kapasitas dasar masyarakat. Cakupan kapasitas dasar ini akan berdampak pada memperbesarnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, yang terdiri dari kecukupan (*sufficiency*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, kesehatan dan keamanan (Todaro, 2000: 21).

Lembaga PBB yang dibentuk untuk menangani masalah pembangunan (*United Nations Development Programme/UNDP*) telah membuat definisi khusus mengenai pembangunan manusia sebagai suatu proses memperluas pilihan-pilihan. Konsep tersebut menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Tujuan utama dari pembangunan oleh UNDP adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi penduduknya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan produktif (Marhaeni, 2011).

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang menjalankan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menetapkan pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini dilakukan melalui fungsi otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini mencakup segala aspek kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1(satu), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Republik Indonesia, 2011)..

Pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat dilakukan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD) khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih, 2003:127). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Harsono, 2007:223). Namun, seiring perkembangan ekonomi maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD.

Kebijakan yang tercermin dalam APBD salah satunya adalah dari sisi belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang alokasi anggaran. Pengalokasian belanja daerah khususnya dalam bidang pembangunan manusia dapat dilakukan melalui belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Penetapan besaran anggaran ini telah diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Selain itu, mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengatur besaran anggaran kesehatan minimal sebesar 10 persen yang harus dianggarkan oleh pemerintah dari APBD (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Peran alokasi pemerintah pada belanja bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan *outcomes* dalam perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan keduanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada cepatnya laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh kenaikan produktivitas sehingga akan mengurangi angka kemiskinan masyarakat. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa alokasi pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan merupakan posisi sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama dalam hal perbaikan kualitas sumberdaya manusia.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Teori pertumbuhan endogen ini mempunyai dua cabang pemikiran. Pertama, *learning by doing* dengan pengenalan hal-hal baru (bersifat eksternal) dalam perekonomian merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua, penemuan-penemuan baru adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi (Priyambodo, 1995).

Belanja pemerintah daerah di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terlihat pada Tabel 1.1. Anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan lebih besar daripada kesehatan di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Belanja pendidikan dan kesehatan terbesar pada 2013 berada di Kota Surabaya dengan besar anggaran Rp 484.866,25 juta dan Rp 217.358,95 juta. Hal ini dikarenakan Kota Surabaya masih menjadi pusat pembangunan dan pusat perekonomian.

Tabel 1.1.
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendidikan	Kesehatan	Kabupaten/Kota	Pendidikan	Kesehatan
PACITAN	189.823,81	20.386,29	MAGETAN	228.072,24	51.622,35
PONOROGO	250.279,19	54.289,47	NGAWI	238.514,08	49.722,86
TRENGGALEK	249.001,95	55.049,18	BOJONEGORO	157.055,31	52.665,28
TULUNGAGUNG	326.807,48	66.992,27	TUBAN	236.599,79	53.280,14
BLITAR	322.014,11	53.817,49	LAMONGAN	308.483,37	73.646,42
KEDIRI	328.160,94	60.195,01	GRESIK	204.030,16	97.379,63
MALANG	271.741,11	71.503,99	BANGKALAN	250.754,12	67.906,89
LUMAJANG	253.891,56	58.634,45	SAMPANG	190.705,87	51.474,20
JEMBER	394.820,12	115.047,31	PAMEKASAN	203.029,40	46.723,85
BANYUWANGI	331.675,55	71.989,25	SUMENEP	213.404,78	54.770,88
BONDOWOSO	199.814,99	48.060,49	Kota		
SITUBONDO	179.794,50	46.411,56	KOTA KEDIRI	96.062,46	64.332,39
PROBOLINGGO	218.794,84	54.191,73	KOTA BLITAR	91.922,51	35.572,08
PASURUAN	275.787,43	72.479,79	KOTA MALANG	231.082,72	49.766,61
SIDOARJO	336.286,38	153.161,69	KOTA		
MOJOKERTO	201.850,81	47.065,63	PROBOLINGGO	101.673,60	35.032,99
JOMBANG	277.515,91	77.943,07	KOTA		
NGANJUK	283.916,22	81.139,71	PASURUAN	41.546,17	18.435,11
MADIUN	192.748,49	43.347,60	KOTA		
			MOJOKERTO	58.676,49	36.126,98
			KOTA MADIUN	110.814,07	37.185,92
			KOTA		
			SURABAYA	484.866,25	217.358,95
			KOTA BATU	59.881,73	7.879,29

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2013

Dampak pembangunan manusia dalam otonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indeks komposit dapat menunjukkan seberapa besar tingkatan pembangunan manusia yang telah dicapai. Indeks komposit ini mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usai hidup (*Logetivity*), pengetahuan (*Knowledge*), dan standar hidup layak (*Decent living*) (BAPPEKO, 2002).

Tabel 1.2.
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

KABUPATEN KOTA	2009	2010	2011	2012	2013
PACITAN	71,45	72,07	72,48	72,88	73,25
PONOROGO	69,75	70,29	71,15	71,91	72,31
TRENGGALEK	72,72	73,24	73,66	74,09	74,45
TULUNGAGUNG	72,93	73,34	73,76	74,45	74,89
BLITAR	73,22	73,67	74,06	74,43	74,76
KEDIRI	71,33	71,75	72,28	72,72	73,09
MALANG	70,09	70,54	71,17	71,94	72,35
LUMAJANG	67,26	67,82	68,55	69,00	69,34
JEMBER	64,33	64,95	65,53	65,99	66,38
BANYUWANGI	68,36	68,89	69,58	70,53	71,03
BONDOWOSO	62,11	62,94	63,81	64,98	65,61
SITUBONDO	63,69	64,26	64,67	65,06	65,36
PROBOLINGGO	62,13	62,99	63,84	64,35	64,79
PASURUAN	66,84	67,61	68,24	69,17	69,60
SIDOARJO	75,88	76,35	76,90	77,36	77,80
MOJOKERTO	72,93	73,39	73,89	74,42	74,88
JOMBANG	72,33	72,70	73,14	73,86	74,24
NGANJUK	70,27	70,76	71,48	71,96	72,36
MADIUN	69,28	70,18	70,50	70,88	71,12
MAGETAN	72,32	72,72	73,17	73,85	74,22
NGAWI	68,41	68,82	69,73	70,20	70,52
BOJONEGORO	66,38	66,92	67,32	67,74	68,06
TUBAN	67,68	68,31	68,71	69,18	69,56
LAMONGAN	69,03	69,63	70,52	71,05	71,42
GRESIK	73,98	74,47	75,17	75,97	76,56
BANGKALAN	64,00	64,51	65,01	65,69	66,12
SAMPANG	58,68	59,70	60,78	61,67	62,46
PAMEKASAN	63,81	64,60	65,48	66,51	67,11
SUMENEP	64,82	65,60	66,01	66,41	66,79
KOTA KEDIRI	75,68	76,28	76,79	77,20	77,59
KOTA BLITAR	76,98	77,42	77,89	78,31	78,63
KOTA MALANG	76,69	77,20	77,76	78,43	78,80
KOTA PROBOLINGGO	73,73	74,33	74,85	75,44	75,81
KOTA PASURUAN	73,01	73,45	73,89	74,33	74,64
KOTA MOJOKERTO	76,43	77,02	77,50	78,01	78,40
KOTA MADIUN	76,23	76,61	77,07	77,50	77,82
KOTA SURABAYA	76,82	77,28	77,85	78,33	78,71
KOTA BATU	73,88	74,45	74,93	75,42	75,75
JAWA TIMUR	71,06	71,62	72,18	72,83	73,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Indikator keberhasilan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia pada 2009-2013 yang terlihat pada Tabel 1.2. Peningkatan IPM Provinsi Jawa

Timur dari 2009 ke 2013 mencapai 73,21, menunjukkan bahwa adanya kenaikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data publikasi BPS (2013) dalam Tabel 1.2 menunjukkan nilai IPM di 29 Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota Provinsi Jawa Timur mulai dari terendah hingga tertinggi. Nilai IPM terendah di 2009-2013 berada pada Kabupaten Sampang. Kota Blitar merupakan kota yang mempunyai nilai IPM tertinggi dari 2009-2011 masing-masing sebesar (76,98), (77,42), dan 77,89. Namun, Kota Surabaya merupakan kota yang mempunyai nilai IPM tertinggi dari tahun 2012-2013 masing-masing sebesar 78,33 dan 78,71.

Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini didukung dengan Hipotesis Kuznet yang menyatakan bahwa peningkatan ekonomi akan berdampak pada peningkatan output per kapita yang akhirnya akan menaikkan IPM. Hal ini dikarenakan pembentukan investasi modal manusia tidak hanya terbatas pada pendidikan dan kesehatan tetapi juga pada indikator komponen daya beli masyarakat. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa PDRB sektoral akan berdampak secara tidak langsung terhadap IPM melalui peningkatan PDRB per kapita sehingga mengeser perubahan pola konsumsi disegi daya beli masyarakat.

Namun, keberhasilan pembangunan manusia ini tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pemerataan. Pembangunan manusia menimbulkan sebuah eksternalitas negatif berupa ketimpangan pembangunan antar wilayah yang semakin tinggi. Pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,

namun pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah (RPJMN 2004-2009, 2005).

Myrdal menyatakan bahwa adanya proses divergen yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi sehingga ketimpangan semakin melebar. Fenomena ini dijelaskan Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*Cumulative Causation/CC*). Myrdal (1957) menjelaskan bahwa terdapat dampak yang kurang menguntungkan dalam proses pembangunan dengan adanya suatu efek *backwash* lebih besar daripada penyebaran (*spread effect*) antara negara maju dan berkembang. Dampak penyebaran adalah dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi ke daerah yang relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian, bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil (Kuncoro, 2013).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan dengan melalui perbedaan PDRB perkapita antar daerah. Perbedaan PDRB perkapita antar daerah ini dapat dilihat adanya kabupaten/kota yang masuk dalam kategori lebih rendah dan lebih tinggi dari PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur. Perbedaan PDRB perkapita di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pengembangan sektoral yang berbeda antar daerah, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah, sumber-sumber penerimaan yang berbeda antar daerah, dan potensi sumberdaya alam yang berbeda (Siagan, 2010). Kota Kediri merupakan daerah yang mempunyai PDRB

perkapita tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp 84.102,79 ribu mencapai Rp 98.090,60 ribu.

Tabel 1.3.
Indeks Bonet Provinsi Jawa Timur 2009-2012

Tahun	Indeks Bonet
2009	0,9992
2010	0,9993
2011	0,9993
2012	0,9992
2013	0,9992

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan dengan menggunakan indikator pengukuran Indeks Bonet. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 1.3. Jika dilihat dari Tabel 1.3 maka selama kurun waktu 2009-2013 cenderung menurun tetapi perubahannya relatif kecil yaitu sebesar 0,0001. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada 2009 Indeks Bonet Provinsi Jawa Timur sebesar 0,9992, kemudian naik pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 0,9993. Namun, angka Indeks Bonet kemudian kembali menurun hingga mencapai 0,9992 pada 2012 dan 2013. Meskipun, Indeks Bonet mengalami perbaikan kembali pada 2012 dan 2013 tetapi nilainya masih relatif sama dengan 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahannya sangat kecil yang berarti ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Timur masih melebar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk

membentuk modal manusia dalam pembangunan ekonomi investasi jangka panjang. Melalui investasi pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan pemerataan pembangunan antar wilayah. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ekonomi, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta disparitas pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh ekonomi, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta disparitas pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ekonomi berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh pada disparitas pembangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis ekonomi berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.
2. Menguji dan menganalisis belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.
3. Menguji dan menganalisis belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.
4. Menguji dan menganalisis belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Menguji dan menganalisis Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh pada disparitas pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmiah

Meningkatkan kemampuan dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ekonomi, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan yang membawa dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta disparitas pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Melalui ini maka dapat dilihat bahwa IPM merupakan salah satu indikator untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, dibalik pencapaian pembangunan ekonomi terdapat *trade off* sehingga menghambat lajunya proses pembangunan. Disparitas pembangunan merupakan salah satu dampak *trade off* dalam proses pembangunan dan sebagai permasalahan baik tingkat nasional maupun regional. Melatih ketajaman analisis terhadap masalah-masalah sekitar yang berkorelasi dengan subjek disiplin ilmu yang dimiliki, yakni ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi publik.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan pengaruh ekonomi, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia serta disparitas pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat secara garis besar mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dijelaskan dalam skripsi dengan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai landasan teori yang dijadikan pedoman dalam pembahasan skripsi. Teori-teori tersebut diperoleh dari literatur-literatur

serta studi dalam proses perkuliahan. Bab ini juga menyampaikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis, model analisis serta kerangka berfikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Berisi hasil dan analisis yang menjelaskan mengenai dekripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan guna menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi pemerintah daerah setempat atau pihak-pihak terkait dan pembaca.